

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Melalui Aplikasi SIPAKU, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Communication* Dalam Kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh penyampaian informasi yang dilakukan tidak intensif, serta kurangnya kejelasan dalam media yang digunakan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
2. *Resources* Dalam Kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU dilihat dari staf, kewenangan, fasilitas sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat kekurangan dalam hal informasi yang menyebabkan website SIPAKU kurang *up to date*, Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola aplikasi SIPAKU.
3. *Disposition* dalam kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui aplikasi SIPAKU menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dari aparatur dalam menjalankan tugas mereka dengan disiplin dan tanggung jawab. Hal ini tercermin dari tingkat kedisiplinan

yang ditunjukkan oleh aparatur dilihat dari pemberian insentif kepada mereka pengguna SIPAKU terbaik .

4. *Bureaucratic Structure* dalam kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui aplikasi SIPAKU dilihat dari SOP yang digunakan masih belum Khusus dan belum lengkap karena kurang disosialisasikan dan fragmentasi dapat dilihat dari adanya kordinasi yang baik antara diskominfo dan aparatur di kewilayahan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui Aplikasi SIPAKU dapat dioptimalkan dengan lebih terencana, tidak dilakukan secara kondisional, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
2. Untuk meningkatkan kompetensinya perlu dilakukannya pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin agar dapat membantu aparatur dan masyarakat itu sendiri dalam memahami dan menerapkan pengetahuan baru dengan lebih mudah.
3. Disposisi atau sikap pelaksana terkait Aplikasi SIPAKU dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan para pelaksana dan komitmen aparatur. Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien aparatur-aparatur tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi harus ada konsistensi dan ditingkatkan untuk melaksanakan kebijakan Aplikasi SIPAKU.

4. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melalui aplikasi SIPAKU terkait SOP harus diperjelas sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat melayani masyarakat di Kota Bandung.